



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 930/102/I-BPKAD/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 930/56/I-BPKAD/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/1394/SETDIS-KEU/DTKT tanggal 12 Mei 2022 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan UPTD BLKI Bontang Disnakertrans Prov. Kaltim dan Penandatanganan SPM TA. 2022;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-2701/TUUA/BKD/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Suryani, S.Sos NIP. 19681212 199403 1 010 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pemasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Mengangkat dengan hormat James Remigius, SH NIP. 19650123 198603 1 012 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kepala UPTD BLKI Bontang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/56/I-BPKAD/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini;
- KEEMPAT** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 28 April 2022

GUVERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.